

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI
SOSIAL (ATENSI) BAGI PENYANDANG DISABILITAS
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



ANISA TRI SOFIA RIZKI SUBEKTI

12270521246

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Anisa Tri Sofia Rizki Subekti

NIM : 12270521246

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul : Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bagi
Penyandang Disabilitas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri
Hulu

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si
NIP. 199209252019032021

MENGETAHUI



Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anisa Tri Sofia Rizki Subekti

NIM : 1227052124

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul : Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bagi
Penyandang Disabilitas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri
Hulu

Tanggal Ujian : Rabu, 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji I
Afrizal, S.Sos., M.Si
NIP. 19690419 200701 1 025

Penguji II
Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si
NIP. 199209252019032021

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, M.Ak
NIP. 19940523 202203 2 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa Tri Sofia Rizki Subekti
 NIM : 12270521246
 Tempat/Tgl. Lahir : Titian Regak / 19 Januari 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Program Asistensi rehabilitasi sosial (ATensi)
Bagi Penyandang Disabilitas Kecamatan Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Des 2025.
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12270521246

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

OLEH :

Anisa Tri Sofia Rizki Subekti

12270521246

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat indikator utama : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, perangkat desa, dan masyarakat penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program ATENSI belum berjalan optimal. Dari Aspek komunikasi lemah sosialisasi kepada masyarakat tidak pernah dilakukan. Pada aspek sumber daya, jumlah pendamping terbatas, sarana-prasarana tidak memadai, dan anggaran belum cukup untuk mendukung kegiatan rehabilitasi sosial secara komprehensif. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik, namun keterbatasan pemahaman teknis menghambat pelayanan. Struktur birokrasi juga belum jelas karena koordinasi yang minim, serta monitoring dan pelaporan yang tidak rutin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program ATENSI masih berfokus pada bantuan fisik dan belum memenuhi standar layanan rehabilitasi sosial sebagaimana diamanatkan Permensos No. 7 Tahun 2021. Diperlukan sosialisasi yang jelas, peningkatan sumber daya, serta penguatan koordinasi agar program dapat diimplementasikan secara efektif.

Kata Kunci : Implementasi, ATENSI, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL REHABILITATION ASSISTANCE PROGRAM FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN SEBERIDA DISTRICT, INDRAGIRI HULU REGENCY

BY :

Anisa Tri Sofia Rizki Subekti

12270521246

This study aims to analyze the implementation of the Social Rehabilitation Assistance Program (ATENSI) for people with disabilities in Seberida District, Indragiri Hulu Regency, using George C. Edwards III's policy implementation theory which includes four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative through interviews, observation, and documentation. Informants consisted of the Indragiri Hulu Regency Social Service, village officials, and people with disabilities. The results of the study indicate that the implementation of the ATENSI Program has not been running optimally. From the communication aspect, socialization to the community has never been carried out. In the resource aspect, the number of companions is limited, facilities and infrastructure are inadequate, and the budget is not enough to support comprehensive social rehabilitation activities. The disposition of the implementers shows a good commitment, but limited technical understanding hinders service. The bureaucratic structure is also unclear due to minimal coordination, as well as irregular monitoring and reporting. This study concludes that the implementation of the ATENSI Program is still focused on physical assistance and has not met the standards of social rehabilitation services as mandated by the Minister of Social Affairs Regulation No. 7 of 2021. Clear socialization, increased resources, and strengthened coordination are needed so that the program can be implemented effectively.

Keywords: Implementation, ATENSI, Persons with Disabilities, Social Services.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bagi Penyandang Disabilitas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing kita dari masa kegelapan menuju era yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, keimanan, dan kemajuan peradaban. Berkat perjuangan dan keteladanan beliau, umat Islam dapat menikmati kehidupan yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, keadilan, serta kasih sayang. Semoga kita semua senantiasa mampu meneladani akhlak mulia beliau dalam setiap langkah kehidupan, baik dalam beribadah, bermasyarakat, maupun menuntut ilmu demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak yang turut berperan dalam membantu kelancaran penelitian ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayah tercinta, Bapak Gunawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negroho, sosok yang menjadi cinta pertama dan panutan dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, dan kasih sayang yang tiada henti. Semangat dan ketulusan ayah dalam mendidik serta memotivasi penulis menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang untuk ayah.

Ucapan terimakasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Ibunda tersayang, Ibunda Tri Mariyani, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan ketulusan. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan semangat yang terus mengiringi langkah penulis hingga dapat berada di tahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang untuk bunda. Kasih sayang dan pengorbanan ayah serta bunda menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk tidak menyerah dan terus berjuang hingga akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan ini. Selain itu, penulis dengan hormat menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Jajarannya.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr, Nurlasera S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si, Ak selaku Wakil Dekan II di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc selaku Sekretaris Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang bapak dan ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
10. Karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.
11. Kepada seluruh pegawai kantor Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Aparat Desa dan Masyarakat penyandang disabilitas Kecamatan seberida yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian serta sudah dengan sangat baik menerima peneliti hingga peneliti mudah menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada Abang Kandung penulis Dedy Mahendra Prasetyo dan Januardy Dwi Saputra penulis terima kasih memberikan segala dukungan, perhatian, serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Dengan doa serta nasehat yang diberikan menjadi penyemangat dan sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses perkuliahan.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis Natasya Amelia Putri, Wulan Puspita Sari, Lenny Shandra, Shindi Indawati, Silvy Indri Hartini, Alya Fitria Wardani, Irmaya Anggun Sari, Indah Permata Sari, Irfandi Raihan Pratama yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perjuangan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang selalu mengiringi setiap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proses. Kehadiran kalian membuat masa kuliah menjadi lebih berwarna dan penuh makna. Semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik, dan kita semua dapat meraih kesuksesan di jalan masing-masing.

14. Kepada keluarga besar Administrasi Negara Lokal A Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, dan dukungan yang telah terjalin selama tujuh semester di bangku perkuliahan. Setiap proses belajar, canda, dan perjuangan bersama telah menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga meskipun kita akan menempuh jalan masing-masing ke depannya.
15. Kepada diri sendiri, Anisa Tri Sofia Rizki Subekti. Terima kasih karena telah mampu bertahan dan terus berjuang hingga sampai di tahap ini. Meskipun banyak rintangan, lelah, dan tantangan yang harus dihadapi, namun diri ini tetap kuat dan tidak menyerah. Terima kasih sudah berani melewati setiap proses dengan sabar dan yakin, hingga akhirnya mampu membuktikan bahwa segala perjuangan dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Penulis merasa bangga pada diri sendiri karena telah berhasil mencapai titik ini dengan usaha dan keteguhan hati.
16. Kepada para ponakan tercinta, Dimas Adly Prasetyo, Raziq Hanan Saputra, Azizah Nur Prasetyo, Alisa Rizkia Saputri, Anindya Nur Prasetyo, dan Arumi Lestari Saputri, yang dengan kehadiran, keceriaan, serta doa tulusnya telah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga kelak kalian tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan membanggakan keluarga.
17. kepada kakak ipar penulis, Kakak Dewi Ratna Sari dan Kakak Mufid Nurul Andriana, atas segala dukungan, perhatian, serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. doa, serta nasihat yang diberikan menjadi penyemangat dan sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selama perkuliahan. Penulis berharap segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

18. Kepada pemilik NIM 12270514967, yang pernah menjadi bagian dari perjalanan personal penulis selama masa awal perkuliahan. Kebersamaan yang terjalin sejak awal studi dan berlangsung selama kurang lebih tiga tahun menghadirkan berbagai dinamika yang tidak selalu berjalan dengan mudah. Proses tersebut meninggalkan pengalaman emosional yang mendalam, namun sekaligus memberikan pelajaran berharga tentang kedewasaan, keikhlasan, dan proses pendewasaan diri. Terima kasih pengalaman, semangat, dan kebaikan yang diberikan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang turut membentuk keteguhan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan pada tahap ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis juga dengan senang hati menerima masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan pembelajaran dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga apa yang telah penulis upayakan dapat memberikan kontribusi positif dan membawa kebaikan bagi banyak orang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 05 Desember 2025

UIN SUSKA RIAU

Anisa Tri Sofia Rizki Subekti

12270521246



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
LANDASAN TEORI	17
2.1 Konsep Kebijakan Publik	17
2.1.1 Pengertian Kebijakan publik	17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.1.2	Tahapan Kebijakan publik	19
2.1.3	Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	22
2.1.4	Jenis Kebijakan Publik.....	23
2.2	Konsep Implementasi kebijakan	24
2.2.1	Pengertian Implementasi kebijakan	24
2.2.2	Model-Model Implementasi.....	25
2.3	Pandangan Islam Tentang Implementasi.....	45
2.4	Penelitian Terdahulu.....	47
2.5	Definisi Konsep.....	53
2.6	Konsep Operasional	54
BAB III		56
METODE PENELITIAN.....		56
3.1	Jenis Penelitian	56
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
3.3	Jenis Dan Sumber Data	57
3.5	Teknik Pengumpulan Data	59
3.6	Teknik Analisa Data	60
BAB IV		64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

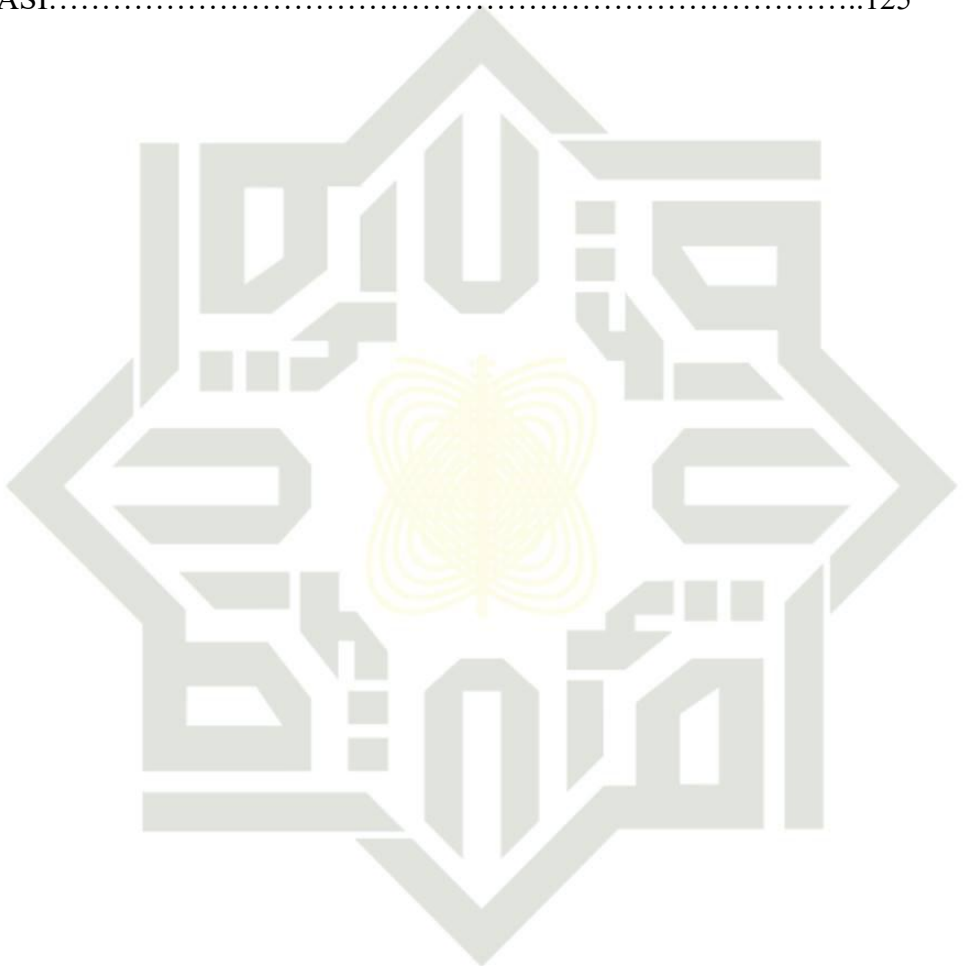
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	64
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu	64
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu	64
4.1.2 Kondisi Geografis dan Topografi Kabupaten Indragiri Hulu	66
4.1.3 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu	69
4.1.4 VISI dan MISI Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu	70
4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupatein Indragiri Hulu	72
BAB V	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
5.1 Implementasi Program Asisteinsi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bagi Penyandang Disabilitas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	73
5.1.1 Komunikasi	74
5.1.2 Sumber daya	84
5.1.3 Disposisi/Sikap Pelaksana	97
5.1.4 Struktur birokrasi	102
5.2 Faktor Penghambat Dalam Menentukan keberhasilan Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Di Kecamatan Seberida	108
BAB VI	117
PENUTUP	117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.1 Kesimpulan.....	117
6.2 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
DOKUMENTASI.....	125



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Provinsi yang memiliki program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).....	4
Tabel 1.2 Jumlah Jenis Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	7
Tabel 1. 3 Jumlah Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	8
Tabel 1.4 Jumlah Penyandang Disabiitas Yang Menerima Bantuan Atensi Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	47
Tabel 2.2 Konsep Operasional Implementasi Kebijakan.....	54
Tabel 3.2 Informan penelitian.....	58
Tabel 4.1 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	66
Tabel 5.1 Jumlah Tenaga Dinas Sosial kabupaten Indragiri Hulu.....	87
Tabel 5.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir.....	55
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Indragiri Hulu.....	68
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu.....	72
Gambar 5.1 Penyaluran Program ATENSI kepada masyarakat disabilitas.....	80
Gambar 5.2 Kursi tunggu khusus untuk penyandang disabilitas.....	91
Gambar 5.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial kabupaten Indragiri Hulu.....	107



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang rentan menghadapi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta berbagai fasilitas umum lainnya. (Purnomosidi, 2017). Penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling sering mengalami diskriminasi dan hak-haknya masih sering tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena mereka sering dianggap sebagai orang yang tidak sempurna, sehingga cenderung mendapat perlakuan tidak adil. Selain itu, masih banyak hak-hak lain yang belum terealisasi bagi para penyandang disabilitas. (Ndaumanu, 2020).

Walaupun begitu, banyak orang masih belum mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial yang cukup, sehingga memengaruhi kualitas hidup mereka dan membuat sulit bagi mereka untuk hidup secara mandiri dan bermartabat. (Santoso & Apsari, 2017). Ini jelas menjadi hal yang tidak baik bagi penyandang disabilitas, karena mereka sering dianggap tidak mampu hidup mandiri atau harus bergantung pada orang lain, sehingga merasa tidak memiliki kemandirian. Sebenarnya, penyandang disabilitas juga harus hidup dengan cara yang sama seperti orang lain di masyarakat, dan berusaha untuk tidak tergantung pada siapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pun. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang biasa. karena hal ini, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus dan lebih baik, agar tidak merasa terasing dan mendapat perlindungan yang cukup. (Syobah, 2018).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara telah terpenuhi, sehingga mereka bisa hidup dengan layak, berkembang secara pribadi, dan menjalankan peran sosialnya sebagai manusia. Dalam proses rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Thohari, 2014). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan pada kemampuan mental, fisik, atau sensorik dalam jangka waktu yang cukup lama. Mereka mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh serta efektif dengan orang lain. Kelompok penyandang disabilitas dibagi menjadi empat jenis, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. (Hestiantini & Pribadi, 2020).

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan sosial seperti yang dijelaskan dalam aturan tersebut. Dalam pasal 41 ayat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 dinyatakan bahwa bantuan sosial diberikan agar membantu penyandang disabilitas meningkatkan kesejahteraannya. Kebijakan program bantuan sosial di Indonesia sangat penting, sesuai dengan pengamanaan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 yang telah diubah terakhir melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bantuan sosial adalah bentuk bantuan yang diberikan secara terbatas dan dipilih secara selektif, berupa uang atau barang, kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam memberikan dan menerima bantuan sosial, baik pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan maupun masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai penerima, diwajibkan untuk menjelaskan dengan jujur bagian bantuan yang diterima sesuai dengan aturan yang berlaku. (Maharani et al., 2023).

Karena itu, pemerintah bisa membuat program bantuan sosial khusus yang membantu penyandang disabilitas. Salah satunya adalah memberikan bantuan sosial langsung kepada mereka, dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti biaya berobat, akses yang mudah, serta alat bantu seperti kursi roda, alat dengar, atau prostetik yang dibutuhkan. Bantuan ini berdampak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

langsung pada kualitas hidup orang dengan disabilitas, sehingga mereka bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, program bantuan sosial bisa menjadi cara yang efektif untuk memberikan bantuan yang lebih inklusif dan meringankan tekanan hidup mereka. Bantuan sosial yang tepat sasaran dan merata akan membantu orang dengan disabilitas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, serta memperkecil perbedaan sosial di masyarakat. (Afifah, 2023).

Tabel 1.1 Provinsi yang memiliki program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

No	Nama Provinsi
1.	Riau
2.	Lampung
3.	Sumatera Selatan
4.	Bangka Belitung
5.	Bengkulu
6.	Sulawesi Selatan
7.	Sulawesi Tenggara
8.	Banten
9.	Jawa Tengah
10.	Bali

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dijalankan berdasarkan Permensos Nomor 7 Tahun 2021. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan perlindungan sosial yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup layak, pelayanan perawatan sosial, terapi fisik dan psikososial, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, serta meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tujuannya agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam masyarakat.

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan bantuan sosial yang menggunakan cara kerja berdasarkan keluarga, komunitas, dan pengasuhan residensial untuk membantu orang atau kelompok yang menghadapi masalah sosial agar bisa menjalankan peran sosialnya dengan normal dan mandiri di tengah masyarakat. Program ini memberikan bantuan yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial, serta pelayanan sosial dan/atau perawatan anak, dukungan dari keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan usaha, bantuan sosial, bantuan tambahan sosial, dan dukungan untuk aksesibilitas. (Fidiyani et al., 2024).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 sebuah program bantuan sosial bersyarat Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas dan lansia secara holistik dan terstandar.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Memberikan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial.
- c. Memenuhi kebutuhan hidup layak penerima program.
- d. Memberikan perawatan sosial dan terapi fisik serta psikososial.
- e. Menyelenggarakan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.
- f. Memberikan bantuan sosial dan dukungan aksesibilitas.
- g. Memfasilitasi penerima agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021, tujuan dari program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah membantu individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang menghadapi masalah sosial. Kelompok yang menjadi sasaran mencakup anak yang membutuhkan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, lansia, korban kekerasan dan eksploitasi, korban bencana alam atau sosial, orang dengan HIV/AIDS, gelandangan dan pengemis, orang dengan gangguan jiwa, serta kelompok rentan lainnya yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Setiap jenis penyandang disabilitas memiliki kriteria tertentu masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.2 Jumlah Jenis Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Disabilitas	2022	2023	2024
1.	Disabilitas Fisik	23	18	20
2.	Disabilitas Sensorik	18	15	18
3.	Disabilitas Intelektual	12	7	10
4.	Disabilitas Mental	8	7	9
5.	Disabilitas Ganda	5	5	7
	Total	66	52	64

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 2025

Berdasarkan data pada tabel, menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di kecamatan seberida kabupaten Indragiri hulu masih mengalami fluktuasi dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2023, namun jumlah tersebut kembali meningkat di tahun 2024. Hal ini memperlihatkan permasalahan dalam upaya penanganan dan pendampingan penyandang disabilitas belum berjalan maksimal, karena jumlah penyandang disabilitas tidak menunjukkan penurunan. Kenaikan jumlah disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental bahkan disabilitas ganda di tahun 2024 menjadi indikasi bahwa program ATENSI belum berjalan secara maksimal. Selain itu, konsistensi data menandakan bahwa masih adanya kendala dalam sistem pendataan dan monitoring. Permasalahan yang terlihat dari data adalah ketidakstabilan jumlah penyandang disabilitas yang menunjukkan belum efektifnya program ini. Sehingga upaya pemerintah dalam memberikan intervensi program ATENSI, maupun rehabilitasi sosial masih menghadapi kendala,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik dari sisi sumber daya, anggaran, maupun konsistensi pendataan.

Tabel 1.3 Jumlah Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Desa	2022	2023	2024
1.	Pangkalan Kasai	4	2	7
2.	Bandar Padang	8	5	7
3.	Beligan	8	6	6
4.	Bukit Meranti	5	3	6
5.	Buluh Rampai	5	5	4
6.	Kelesa	5	7	4
7.	Payarumbai	4	8	7
8.	Petala Bumi	6	3	5
9.	Seresam	3	5	5
10.	Sibabat	8	5	7
11.	Titian Resak	4	3	6
Total		66	52	64

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 2025

Berdasarkan data pada tabel, menunjukan bahwa program yang dilakukan belum konsisten dan belum efektif dalam menekankan jumlah penyandang disabilitas. Ada pendataan yang belum optimal sehingga data tiap tahun tidak menggambarkan kondisi real di lapangan. Dengan demikian, permasalahan yang muncul dari data ini adalah ketidakstabilan jumlah penyandang di tiap desa, yang menandakan masih lemahnya sistem pendataan serta belum maksimalnya program pemerintah dalam memberikan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 1.4 Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan Atensi Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Bantuan	2022	2023	2024
1.	Kursi Roda	24	11	5
2.	Tongkat	10	2	13
3.	Alat Bantu Dengar	1	0	4
4.	Tangan Palsu	1	0	0
5.	Sembako	0	3	5
6.	Kaki Palsu	2	0	4
	Total	38	31	34

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 2025

Berdasarkan data pada tabel, menunjukkan bahwa bantuan seharusnya mencakup layanan yang komprehensif meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan aksesibilitas dan alat bantu, dukungan keluarga, terapi fisik, psikososial dan mental spiritual serta pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan. Namun, permasalahan yang muncul dari data ini adalah bantuan yang disalurkan masih terbatas hanya pada bentuk alat bantu sederhana seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar serta bantuan tunai atau sembako, tanpa ada bentuk dukungan yang lebih luas sebagaimana amanat Permensos no 7 tahun 2021. Artinya implementasi program ATENSI di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi, karena lebih menekankan aspek bantuan material dibandingkan aspek rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Belum adanya layanan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan atau dukungan kewirausahaan, yang seharusnya menjadi bagian penting dari Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Namun proses pendataan yang dilakukan oleh aparat desa atau pihak non-profesional sering kali tidak melalui mekanisme asesmen yang komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh Permensos Nomor 7 Tahun 2021, yang menekankan bahwa penetapan penerima manfaat harus berbasis hasil asesmen oleh pekerja sosial profesional. Akibatnya, data yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Beberapa penyandang disabilitas yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara yang tidak terlalu prioritas justru memperoleh layanan lebih dulu. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pemutakhiran data secara berkala, tidak adanya pelibatan aktif komunitas disabilitas dalam proses verifikasi, dan terbatasnya koordinasi antar instansi (seperti dinas sosial, puskesmas, dan perangkat desa). Dampaknya, penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran, memicu kecemburuan sosial di antara penyandang disabilitas, serta mengurangi efektivitas program di mata masyarakat. Kelemahan dalam sistem pendataan ini menjadi salah satu akar dari gagalnya program dalam menjangkau kelompok disabilitas secara menyeluruh dan adil, sehingga perlu dilakukan evaluasi mekanisme identifikasi penerima manfaat yang lebih partisipatif, profesional, dan berbasis data yang valid.

Permasalahan semakin kompleks ketika melihat belum optimalnya pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. Program ini semestinya tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada individu penyandang disabilitas, tetapi juga melibatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara menyeluruh. Namun, kenyataannya program di tingkat lokal masih cenderung bersifat individual dan berorientasi pada pemberian barang, seperti alat bantu atau sembako, tanpa upaya serius untuk memberdayakan lingkungan terdekat penyandang disabilitas. Keluarga, sebagai unit terdekat yang seharusnya mendukung pemulihan dan pengembangan kemandirian, seringkali tidak diberi pelatihan, edukasi, atau peran aktif dalam program. Begitu pula dengan komunitas atau kelompok sosial di sekitar, yang seharusnya menjadi agen pendukung inklusi sosial, justru tidak difasilitasi untuk terlibat atau diberdayakan. Akibatnya, penyandang disabilitas tetap berada dalam lingkaran ketergantungan, tidak memiliki dukungan sosial yang kuat, dan seringkali mengalami diskriminasi atau keterasingan dari lingkungan sekitarnya. Ketidakhadiran peran keluarga dan komunitas ini melemahkan upaya rehabilitasi yang seharusnya bersifat kolektif dan berkelanjutan, serta menghambat terciptanya masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas di tingkat lokal.

Meskipun program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) telah dirancang sebagai salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial, implementasinya di berbagai daerah belum sepenuhnya efektif. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada efektivitas program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) secara nasional atau di daerah perkotaan dengan akses layanan sosial yang relatif memadai, evaluasi administratif dan statistik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

distribusi bantuan tanpa menggali pengalaman langsung penyandang disabilitas di daerah terpencil, serta pada kelompok rentan secara umum, bukan secara spesifik pada penyandang disabilitas di tingkat kecamatan atau pedesaan. Namun hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji Bagaimana implementasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berlangsung di wilayah pedesaan dan terpencil seperti Kecamatan Seberida, yang memiliki tantangan geografis, infrastruktur, dan sosial budaya yang berbeda dibandingkan kota besar. Kesenjangan antara desain kebijakan pusat dengan realitas pelaksanaan di tingkat lokal, termasuk dalam hal pendataan, sosialisasi, keterlibatan komunitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Persepsi dan pengalaman langsung penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat, yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana tujuan program benar-benar menyentuh kebutuhan mereka secara nyata.

Walaupun Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan bantuan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) , kenyataannya masih ditemukan berbagai tantangan dalam memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas terhadap layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan implementasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu ditelusuri berbagai faktor yang berperan sebagai penghambat maupun pendorong suksesnya penerapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu , agar pelayanan rehabilitasi sosial terwujud secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan penelitian yang fokus pada implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang muncul dalam proses implementasi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mendukung upaya negara dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**

2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas di Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk menganalisis Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan berbagai macam manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat dimasukkan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang ada dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga kerangka proposal menjadi jelas dan terstruktur, serta kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan penulis penelitian ini dibagi menjadi tiga bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori, konsep operasional/variable penelitian dan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat ditarik suatu

3. Manfaat Akademis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b) Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap perkembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang keadaan umum kondisi geografis dan monografi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan,

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan strategis yang diambil oleh aktor pemerintahan, baik dalam bentuk tindakan langsung maupun keputusan untuk tidak bertindak, yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Desrinelti, D., Maghfirah Afifah, 2021). Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Definisi ini menekankan bahwa tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut, Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai "alokasi nilai secara otoritatif bagi seluruh masyarakat", yang artinya hanya lembaga yang sah secara politik (seperti pemerintah) yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang berdampak bagi masyarakat luas. Kebijakan publik bukan hanya serangkaian tindakan teknokratik, melainkan bentuk konkret dari perumusan nilai, prioritas, dan keadilan dalam masyarakat. (Rantung, 2024)

Pendapat Dye tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh Heidenheimer, et. al. dalam (Winarno Budi & Admojo Trio, 2014) bahwa kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik merupakan studi tentang ‘bagaimana, mengapa, dan apa konsekuensi’ dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah. Selain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Indiahono, 2005)

Kebijakan publik sebagai suatu keputusan memiliki tujuan yang jelas seperti yang dikemukakan oleh (Deddy, 2018) “Kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi kesalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam suatu kebijakan tertentu”.

Sementara itu, (Agustino, 2017) dalam (Kusnadi & Baihaqi, 2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut (Wahab Abdul, 2002) dalam (Firdaus, 2019) , kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Said (2004) dalam (Taufiqurokhman, 2014) kebijakan umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:



- a. Kebijakan umum, yang mengarahkan pelaksanaan di seluruh wilayah atau instansi yang bersangkutan;
- b. Kebijakan pelaksanaan, yang menjelaskan kebijakan umum dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang di tingkat pusat; dan
- c. Kebijakan teknis dan operasional, yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

2.1.2 Tahapan Kebijakan publik

Menurut (N. Dunn, 2003) dalam Evaluasi Kebijakan Publik (Desrinelti, D., Maghbrah Afifah, 2021) , terdapat lima tahapan utama dalam siklus kebijakan publik yang dijelaskan secara sistematis. Masing-masing tahap memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa kebijakan bersifat responsif, adaptif, dan terukur:

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Merupakan tahap awal ketika suatu isu dianggap penting dan layak masuk dalam perhatian pemerintah. Pada titik ini, aktor kebijakan dan pemangku kepentingan bersaing untuk menentukan isu mana yang patut diangkat. Jika suatu isu berhasil masuk dalam agenda, maka sumber daya publik dapat dialokasikan untuk penyelesaiannya. Menurut (N. Dunn, 2003) dalam (Maulana & Nugroho, 2019) Ada tiga tugas yang harus diselesaikan untuk mempersiapkan kebijakan agenda, khususnya:

Menumbuhkan kesadaran di kalangan pihak berwenang Bahwa suatu fenomena dapat diidentifikasi sebagai sebuah permasalahan yang nyata. karena suatu gejala mungkin dianggap sebagai masalah oleh sekelompok masyarakat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, namun tidak dipandang sebagai suatu masalah oleh kelompok masyarakat lainnya;

Menciptakan batasan untuk masalah tersebut; dan

Menggerakkan orang untuk mendukung agar masalah tersebut menjadi agenda pemerintah. Oleh karena itu, Sebuah masalah mungkin tidak dibahas sama sekali pada tahap ini, sementara masalah lainnya dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama.

2. Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi dirancang berdasarkan data dan kajian analitik. Formulasi mencakup identifikasi pilihan kebijakan, konsekuensi masing-masing alternatif, serta peran berbagai aktor dalam pelaksanaannya. Tahap ini menuntut rasionalitas dan transparansi agar kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga adil bagi semua pihak.

3. Adopsi atau Penetapan Kebijakan

Setelah melalui perumusan, alternatif yang paling tepat akan dipilih dan ditetapkan secara legal melalui peraturan perundang-undangan. Tahap ini melibatkan lembaga formal seperti DPR, kementerian, dan otoritas terkait yang memiliki kekuasaan legislatif atau eksekutif untuk menyetujui kebijakan.

Menurut (Effendi, 2021), tahap ini ditentukan setelah proses rekomendasi yang diikuti oleh langkah rekomendasi meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menentukan opsi Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk meraih masa depan yang diinginkan, yang merupakan strategi terbaik untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Menetapkan kriteria untuk menilai opsi yang ada;
- c. Melakukan evaluasi terhadap opsi tersebut dengan menggunakan kriteria yang relevan, sehingga dampak positif dari kebijakan yang diusulkan dapat melebihi dampak negatifnya.
4. Implementasi Kebijakan
Implementasi adalah proses konkretisasi kebijakan dalam bentuk program, proyek, dan kegiatan nyata di masyarakat. Pelaksanaan harus disertai oleh alokasi anggaran, SDM yang kompeten, sistem monitoring, serta kesiapan organisasi pelaksana. Tantangan utama di tahap ini adalah koordinasi dan komunikasi antar pelaksana kebijakan.
5. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi adalah tahap akhir yang menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan. Evaluasi dapat dilakukan dalam tiga bentuk: ex-ante (sebelum), on-going (saat pelaksanaan), dan ex-post (setelah pelaksanaan). Evaluasi yang baik memungkinkan perbaikan kebijakan untuk siklus selanjutnya.



2.1.3 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno (2010) dalam (Firdaus, 2019) antara lain:

- a. Kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini dapat dilakukan secara sengaja atau muncul akibat peristiwa yang tidak terduga dan kebetulan. Kebijakan publik ini beroperasi dalam konteks politik yang lebih luas dicirikan oleh perencanaan sistematis.
- b. Kebijakan pada dasarnya terdiri dari serangkaian tindakan yang saling terhubung, mengikuti pola-pola yang telah ditetapkan, dan bertujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis oleh perwakilan pemerintah dan keputusan keputusan yang telah ditetapkan.
- c. Lingkup kebijakan tidak cukup mencakup pengambilan keputusan legislatif dalam domain masing-masing; melainkan, kebijakan tersebut sebagian besar diatur oleh resolusi yang berkaitan dengan penegakan tindakan koersif.
- d. Kebijakan secara intrinsik terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah deklarasi formal yang dibuat oleh pemerintah dalam domain tertentu.
- e. Kebijakan publik dapat menghasilkan hasil yang positif atau negatif, karena mencakup pilihan yang dibuat oleh pejabat negara mengenai ketidakaktifan yang mungkin menimbulkan tantangan, yang memerlukan intervensi pemerintah sebagai respons terhadap masalah atau komplikasi yang ada.



2.1.4 Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson seperti yang dikutip dalam Mawati (2022) menyampaikan bahwa kelas kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan procedural dan kebijakan substantif Kebijakan procedural adalah cara peraturan diterapkan, sedangkan Kebijakan substantif merujuk pada kebijakan yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah.
- b. Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive Pendistribusian jasa atau penggunaan untuk kepentingan masyarakat atau individu dikenal dengan istilah kebijakan distributif. Kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan regulasi adalah kebijakan yang berbentuk pembatasan atau pembatasan perilaku publik oleh individu atau organisasi. Disisi lain, kebijakan redistributif mengontrol cara kelompok masyarakat yang berbeda membagi kekayaan, pendapatan, kepemilikan, atau hak.
- c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik Kelompok sasaran mendapatkan keuntungan dari sumber daya tertentu melalui kebijakan material, sedangkan kelompok sasaran mendapatkan keuntungan melalui kebijakan simbolik.
- d. Kebijakan yang berkaitan dengan barang umum dan barang privat Kebijakan umum fokus pada penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan kebijakan privat bertujuan untuk mengatur penyediaan barang dan jasa oleh sektor swasta di pasar bebas.



2.2 Konsep Implementasi kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. (Kurhayadi, 2021).

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan atau program yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan berbagai pihak terkait. (Delpiero Roring et al., 2021)

Menurut Mclaughlin dan Schubert dikutip oleh (Nurdin & Basyiruddin, 2003) dalam (Zacky Aqshal Dhamara Putra & Hasan Ismail, 2024) menyebutkan pengertian implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Yuliah, 2020) implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan.

Dari beberapa pengertian implementasi yang di uraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu ide, kebijakan, atau program ke dalam tindakan nyata yang dirancang secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi merupakan kegiatan yang terencana, terstruktur, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma atau acuan tertentu. Dalam proses ini, terjadi penyesuaian dan interaksi antara berbagai elemen dalam sistem yang bertujuan menghasilkan perubahan, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun hasil kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Model-Model Implementasi

Ada beberapa model implementasi kebijakan publik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Model-model nya sebagai berikut:

a. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Menurut (Mazmanian, Daniel A & Paul A Sabatier, 1983) dalam (Goggin et al., 1984) proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah terlepas dari kenyataan bahwa banyak sekali kesukaran-kesukaran yang dijumpai dalam implementasi program-program pemerintah, sebenarnya terdapat sejumlah masalah-masalah sosial yang jauh lebih mudah untuk ditangani bila dibandingkan dengan masalah lainnya. Aspek-aspek teknis dari permasalahan serta perilaku yang akan diatur sangat bervariasi sehingga hal ini menjadi kendala dalam implementasi program. Hal-hal yang dapat mempengaruhi program dari sudut pandang ini adalah :

1. Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur kinerja kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Contohnya adalah kebijakan penyeragaman kurikulum sekolah-sekolah dasar di seluruh Indonesia yang lalu dalam pelaksanaannya hamper dikatakan tidak banyak menemui hambatan-hambatan teknis sehingga tujuan-tujuan formal dari kebijakan tersebut dapat direalisasikan dengan relatif mudah. Sementara itu kebijakan pengendalian/pelestarian lingkungan hidup berjalan tersendat-sendat karena kesukaran-kesukaran dalam memonitor secara teratur kadar polusi lingkungan, luasnya wilayah yang harus dicakup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam program, masih rendahnya kesadaran para pelaku, relatif mahal nya peralatan yang digunakan dan masih rendahnya pengetahuan teknis para pejabat di daerah mengenai masalah yang ditangani. Setiap program jelas akan mencakup masalah biaya yang biasanya dikumpulkan dari wajib pajak serta dari kelompok-kelompok sasaran. Biaya yang dipikul tidak sebanding dengan tindakan-tindakan perbaikan terhadap masalah yang sedang dihadapi, maka dukungan politik terhadap program tersebut kemungkinan akan mengalami penurunan yang menimbulkan perubahan tujuan formalnya. Adanya teknologi yang canggih yang menjadi syarat dapat dilaksanakannya suatu program baru mungkin akan menimbulkan desakan-desakan keras berbagai pihak untuk menunda sementara waktu pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan hingga diperoleh kepastian bahwa telah tersedia sarana atau teknologi yang dapat menjamin efektifitas pencapaian tujuan tersebut.

2. Keragaman perilaku yang akan diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur atau semakin beragam pelayanan yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus diberikan kepada para pejabat lapangan. Mengingat adanya kemungkinan perbedaan komitmen para pejabat lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan keputusan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pemberian kebebasan bertindak tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

3. Presentase Totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Secara umum dapat dikatakan di sini, bahwa semakin kecil dan semakin jelas perilakunya akan berubah, maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasi dukungan politik terhadap program dan dengan demikian akan semakin terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

4. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

Jumlah modifikasi perilaku yang diinginkan untuk mencapai tujuan formal adalah fungsi dari jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang diminta dari mereka. Semakin besar perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sulit mencapai implementasi yang berhasil. Variabel dibawah ini mengungkapkan bahwa suatu permasalahan sosial pada umumnya akan lebih dapat dikendalikan apabila Tersedia teori yang andal yang mampu menjelaskan hubungan antara perubahan perilaku dan pemecahan masalah, persyaratan teknologinya terpenuhi, dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut tidak mahal, Variasi/perbedaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku yang menyebabkan timbulnya masalah relatif kecil, kelompok sasaran tersebut merupakan sebagian kecil dari totalitas penduduk suatu wilayah, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan sedang.

- b) Variabel intervening yaitu kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi pada prinsipnya perintah eksekutif untuk dapat menstrukturkan proses implementasi dengan cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya dengan cara menyeleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, dengan cara memberikan kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga tersebut. Para pembuat kebijakan dapat memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan dengan cara mendayagunakan izin yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat yaitu :

1. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peran yang sangat penting sebagai alat bantu dalam transmisi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi para pejabat-pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. Tujuan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas juga dapat berperan sebagai sumber-sumber bagi para aktor yang terlibat, baik yang ada di dalam lembaga maupun yang ada di luar lembaga. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun berdasarkan urutan kepentingannya bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa kebijakan keluaran dari badan-badan pelaksana dan pada gilirannya perilaku kelompok-kelompok sasaran akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut.

2. Keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan

Setiap usaha pembaharuan sosial setidaknya secara implisit memuat teori kausal tertentu yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan itu akan tercapai. Dalam kaitan ini harus diakui bahwa salah satu kontribusi penting dari implementasi analisis ini adalah perhatiannya pada teori yang mengenai secara menyeluruh bagaimana cara mencapai perubahan-perubahan yang dikehendaki. Hubungan yang baik suatu teori kausal mensyaratkan bahwa hubungan-hubungan timbal balik antara campur tangan pemerintah disatu pihak, dan tercapainya tujuan-tujuan program dapat dipahami dengan jelas.

3. Ketepatan alokasi-sumber-sumber dana

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program-program dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulatif juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga dan untuk memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan/peraturan tersebut. Secara umum tersedianya dana sangat diperlukan agar peluang terbuka untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

4. Keterpaduan hierarki dalam lingkungan dan antar lembaga-lembaga/instansi pelaksana

Beberapa ahli menyatakan bahwa kesukaran-kesukaran untuk mewujudkan tindakan yang terkoordinasi dilingkungan badan/instansi tertentu dan diantara sejumlah besar badan-badan lain yang terlibat. Masalah koordinasi ini semakin runyam jika mengenai peraturan pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya seringkali sangat tergantung pada pemerintah daerah. Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundang-undangan yang baik adalah kemampuannya untuk memadukan hierarki badan-badan pelaksana.

5. Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan tujuan, memperkecil hambatan, dan mengintensifkan yang memadahi bagi terpenuhinya sasaran kelompok-kelompok, suatu undang-undang masih dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi dengan cara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggariskan secara formal aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana.

6. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termatup dalam undang-undang/peraturan

Pada prinsipnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pembuat undang-undang/peraturan untuk menjamin bahwa para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi tercapainya tujuan. Jawaban untuk implementasi dapat ditugaskan pada badan-badan yang atau tanggung jawab kebijakannya sejalan dengan peraturan dan menyiapkan program pada prioritas utama.

7. Akses formal pihak-pihak luar

Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang untuk partisipasi terbuka bagi aktor-aktor di luar badan-badan pelaksana yang mempengaruhi tujuan pendukung. Aktor-aktor diluar badan pelaksana yang mau dan mampu berpartisipasi untuk mendukung program dapat mempengaruhi tercapainya tujuan.

- c) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengann indikator :

1. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu peraturan. Selain itu, perbedaan-perbedaan kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi persepsi mengenai kadar pentingnya masalah yang akan ditanggulangi. Kalau pada waktu yang sama masih ada masalah lain yang harus ditanggulangi maka kemungkinan untuk memperoleh sumber daya menjadi sulit. Kedua, keberhasilan implementasi mungkin akan lebih sulit dipahami mengingat perbedaan-perbedaan kondisi sosial ekonomi setempat. Perbedaan ini menimbulkan desakan-desakan untuk membuat aturan-aturan yang luwes dan yang memberikan keluasaan untuk melakukan tindakan-tindakan administrasi tertentu pada satuan-satuan organisasi lokal. Artinya bahwa tercapainya tujuan tergantung pada tingkat dukungan lokal terhadap peraturan tersebut. Ketiga, dukungan terhadap peraturan yang bertujuan melindungi lingkungan hidup dengan sumber-sumber keuangan dari kelompok sasaran dan kelompok lain yang memiliki posisi strategis dalam sektor ekonomi secara keseluruhan.

2. Dukungan publik

Hakikatnya perhatian publik yang bersifat sesaat dalam siklus tertentu dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu. Karena untuk dapat mencapai hasil implementasi kebijakan setiap program memerlukan dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam alokasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran maupun perlindungan dari aktor yang tidak mendukung kebijakan.

3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok sasaran
Kelompok-kelompok masyarakat dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan baik yang bersifat mendukung program maupun yang menentang program. Kelompok-kelompok masyarakat berinteraksi dengan variabel lain melalui sejumlah tertentu yaitu Pertama , keanggotaan sumber-sumber keuangan mereka cenderung berbeda-beda sesuai dengan dukungan publik bagi posisi mereka dan cakupan perubahan perilaku yang ditentukan oleh tujuan peraturan. Kedua , kelompok-kelompok masyarakat dapat secara langsung mempengaruhi keputusan-keputusan badan-badan pelaksana melalui pemberian pendapat atas keputusan-keputusan yang bersangkutan dan melalui kontribusi mereka berupa sumber-sumber yang diberikan. Ketiga , kelompok-kelompok tersebut mungkin mampu mempengaruhi kebijakan secara tidak langsung yaitu melalui publikasi hasil penelitian yang kritis mengenai prestasi kerja badan tersebut atau melalui pengumpulan pendapat umum.
4. Dukungan dari badan-badan/lembaga-lembaga atasan yang berwenang.

Lembaga-lembaga atasan dari badan-badan pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap tujuan-tujuan undang-undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui jumlah dan arah pengawasan, menyediakan sumber-sumber keuangan, banyaknya tugas-tugas yang baru saling bertentangan dengan tugas yang lama.

5. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana Variabel yang paling berpengaruh langsung terhadap keluaran kebijakan badan-badan pelaksana adalah kesepakatan para pejabat badan pelaksana terhadap upaya terwujudnya tujuan undang-undang. Dimana sedikitnya dua komponen yaitu arah dan pemeringkatan tujuan-tujuan tersebut dalam skala prioritas pejabat-pejabat tersebut dan kemampuan pejabat-pejabat dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut.

b. Model Implementasi oleh George C. Edwards III

Menurut George III Edward, (1980) Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu :

a) Implementasi Komunikasi

akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang diperankan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan rumit. Seseorang bisa bertahan hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa pun yang memainkan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sejatinnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para pelaksana kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para pelaksana secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b) Sumberdaya

Tidak masalah menjadi seberapa jelas dan konsisten implementasi program dan seberapa akurat komunikasi yang dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan menyediakan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat melaksanakan programnya secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan keterampilan/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu diperlukan adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan hingga peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak mengetahui kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kurangnya informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan mempunyai konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bernegosiasi, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisiensi. Implementasi kebijakan mensyaratkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengawas pengadaan.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang memadai. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c) Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga bentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan; Kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program terhadap penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi-sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah penempatan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Selain itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d) Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap sub unit keputusan-keputusan dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks memerlukan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

c. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn

Menurut (Van Meter, D. S. & Van Horn, 2020) suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konsep yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kebijakan. Mereka menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur-prosedur pelaksanaan. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah :

- a. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam memperkenalkan perubahan dalam organisasi
- b. Jauhnya tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap peningkatan struktur, masalah ini mencakup kekuasaan dari pihak paling rendah dalam organisasi yang bersangkutan.
- c. Seberapa pentingkah rasa yang terjadi masing-masing orang dalam organisasi (masalah yang ada).

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pandangan tersebut maka Van Horn dan Van Meter membuat tipologi kebijakan menurut :

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan terjadi
- b. Jangkauan atau cakupan kesepakatan terhadap tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Asasannya yang dikemukakan hal ini adalah bahwa proses penerapannya akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Hal lain yang dikemukakan mereka adalah bahwa yang menghubungkan kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling terkait. Variabel bebas itu adalah

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi
- d. Sikap para pelaksana
- e. Lingkungan ekonomi, sosial, politik

d. Implementasi Kebijakan Model Goggin

Untuk mengimplementasikan kebijakan menggunakan model Goggin ini, dapat diidentifikasi beberapa variabel yang mempengaruhi tujuan implementasi formal, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. bentuk dan isi kebijakan, termasuk bagaimana kebijakan dapat mengatur implementasi
- b. kemampuan organisasi untuk memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi, seperti dana dan insentif lainnya
- c. dampak masyarakat dan lingkungan yang dapat terjadi.

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi masalah dapat diatasi dengan berbagai pendekatan. Setiap model menawarkan perspektif yang berbeda mengenai dimensi tertentu dari realitas. Tersedianya beragam pendekatan dengan model yang berbeda memiliki keunggulan komparatif sebagai sebuah penjelasan dalam konteks yang bervariasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model George C Edward III karena peneliti menurut peneliti model ini sangat cocok untuk judul yang diambil peneliti seperti:

- a. Komunikasi

Kebijakan akan sulit diimplementasikan apabila informasi mengenai program tidak tersampaikan dengan jelas kepada pelaksana. Dalam konteks ATENSI, kejelasan tentang tujuan program, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis harus dikomunikasikan secara konsisten agar pelaksana di tingkat desa memahami peran dan tugas mereka. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pelaksana memahami isi kebijakan secara akurat dan tidak salah menafsirkan instruksi yang diberikan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. SumberDaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya, baik berupa dana, tenaga profesional, sarana prasarana (alat bantu, fasilitas layanan sosial), maupun informasi teknis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keterbatasan dana dan minimnya pendamping sosial di lapangan menjadi salah satu hambatan utama. Oleh karena itu, model Edwards III sangat relevan karena menekankan bahwa komunikasi yang baik tidak akan berarti jika tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai.

c. DisposisiatauSikapPelaksana

Salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah komitmen dan sikap pelaksana terhadap program. Jika pelaksana memahami dan menyetujui tujuan kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusias dan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, jika tidak ada kepedulian atau kurangnya kesadaran, pelaksanaan cenderung bersifat administratif saja dan tidak menyentuh kebutuhan penyandang disabilitas secara mendalam. Sikap ini sangat menentukan kualitas implementasi.

d. StrukturBirokrasi

Struktur organisasi, termasuk pembagian tugas, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan, sangat memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Dalam kasus ATENSI di Kecamatan Seberida, masalah seperti koordinasi yang lemah antara dinas sosial, perangkat desa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lembaga pendukung menjadi hambatan besar. Model Edwards III memperjelas bahwa tanpa struktur birokrasi yang efektif dan responsif, implementasi akan terhambat walaupun kebijakan sudah jelas dan sumber daya tersedia.

2.3 Pandangan Islam Tentang Implementasi

Kebijakan Implementasi kebijakan dalam pandangan Islam merujuk pada proses penerapan keputusan atau aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam Islam, kebijakan tidak hanya dilihat sebagai keputusan administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip Islam yang berkesinambungan dengan Implementasi Kebijakan yakni pada surah An-Nisa ayat 58 dan surah Asy-Syura ayat 38

عِظْكُمْ بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَإْتِ اللَّهُ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِ
بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa ayat 58)



وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S Asy-Syura ayat 38)

QS. An-Nisa ayat 58 dan QS. Asy-Syura ayat 38 menekankan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah sebagai landasan implementasi kebijakan. QS. An-Nisa ayat 58 mengajarkan bahwa pemimpin wajib menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan kebijakan secara adil, sedangkan QS. Asy-Syura ayat 38 menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan mencerminkan aspirasi dan kemaslahatan bersama. Kedua ayat ini menggarisbawahi bahwa kebijakan dalam Islam harus transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta Allah SWT.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Lutfiah Fitri Fadhilah, Muaz Tanjung (2024)	Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kepada Masyarakat Muslim Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat	Hasil penelitian yang ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada masyarakat Muslim penyandang disabilitas di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan dana tunai sebesar Rp300.000 per bulan yang dicairkan setiap empat bulan, bantuan alat bantu disabilitas seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, dan anggota tubuh buatan, serta bantuan permakanan, sandang, dan modal usaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan tersebut juga disertai pelatihan keterampilan melalui kerja sama dengan organisasi seperti GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia),	Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program ATENSI telah tepat sasaran, masih terdapat hambatan signifikan seperti keterbatasan anggaran dan jumlah sumber daya manusia di Dinas Sosial. Program yang diberikan mencakup bantuan uang tunai, alat bantu, pelatihan keterampilan, serta modal UMKM, dan melibatkan organisasi seperti GERKATIN. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor serta harapan peningkatan jangkauan program melalui anggaran yang lebih besar. Sedangkan penelitian saat ini menekankan pada implementasi kebijakan secara umum dan kesesuaian program ATENSI berdasarkan regulasi seperti Permensos No. 7 Tahun 2021. Fokus utamanya adalah identifikasi kendala struktural seperti ketidaktepatan sasaran, data penerima bantuan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi para penerima manfaat.	yang tidak akurat, bantuan yang belum merata, dan keterbatasan anggaran.
Fahdha Ajmala Sobri, Ahmad M. Kesos & Tuti Kartika, PH. (2022)	Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Bagi Keluarga Miskin Melalui Warung Makan Indomie (Warmindo) Di Kota Bandung	Hasil penelitian ini Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi Keluarga Miskin melalui Warung Makan Indomie (Warmindo) di Kota Bandung menunjukkan bahwa program Atensi Warmindo telah dilaksanakan dengan cukup baik dan memberikan dampak nyata bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini, yang berbasis kewirausahaan, memberikan bantuan berupa gerobak, perlengkapan usaha, dan bahan makanan awal untuk mendukung kegiatan berjualan mie instan oleh keluarga miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KPM mengalami peningkatan pendapatan hingga 80%, serta perubahan positif dalam aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan fisik. Namun demikian, tidak semua perubahan bersifat positif. Beberapa KPM	Penelitian ini berfokus pada keluarga miskin non-disabilitas di perkotaan dan lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mikro (kewirausahaan). Penelitian ini juga unik karena menggandeng sektor swasta (PT Indofood) dalam pelaksanaan program, serta menggali secara rinci perubahan multidimensi yang dialami oleh KPM. Sedangkan Penelitian sekarang lebih fokus pada penyandang disabilitas dan menyoroti implementasi bantuan sosial dalam bentuk dana tunai, alat bantu, serta pelatihan, tetapi juga mengungkap berbagai kendala seperti data yang tidak akurat, anggaran terbatas, dan penyaluran bantuan yang belum merata . Penelitian Anisa berlandaskan pada aspek kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program di wilayah pedesaan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mengalami penurunan pendapatan, permasalahan modal, dan stigma dari masyarakat sekitar. Penelitian ini menekankan pentingnya monitoring dan pendampingan pasca-bantuan agar program dapat lebih berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian keluarga miskin.	
Raihan Maulana (2023)	Dampak Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Dalam Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di sentra Mulya Jaya Jakarta	Hasil penelitian ini mengenai Dampak Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Sentra Mulya Jaya Jakarta menunjukkan bahwa program ATENSI memberikan dampak positif dalam mengubah perilaku anak-anak yang sebelumnya terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini menemukan bahwa tahapan-tahapan rehabilitasi yang dilaksanakan—mulai dari pendekatan awal, assesment, perencanaan layanan, implementasi program, hingga pasca layanan—berhasil	Penelitian ini berfokus pada anak berhadapan hukum (ABH) sebagai kelompok sasaran utama dan menekankan aspek perubahan perilaku individual yang terjadi selama menjalani program rehabilitasi sosial di Sentra Mulya Jaya. Pendekatan yang digunakan sangat psikososial dan partisipatif, dengan penekanan pada proses terapi dan intervensi individual. Sedangkan Penelitian sekarang lebih berfokus pada penyandang disabilitas dan menyoroti kebijakan serta efektivitas pelaksanaan program ATENSI di tingkat desa, terutama dari sisi teknis dan birokrasi. Sedangkan penelitian saat ini



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		menumbuhkan kesadaran, ketertarikan, dan motivasi pada anak untuk berubah. Anak-anak yang menjadi informan dalam penelitian ini menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku, seperti menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan meninggalkan kebiasaan buruk. Terapi spiritual, psikososial, serta pendekatan empatik dari pekerja sosial terbukti sangat membantu dalam proses rehabilitasi ini.	menekankan kendala administratif, seperti ketidaktepatan data penerima bantuan, keterbatasan anggaran, dan jangkauan program yang belum merata, tanpa menggali secara mendalam perubahan perilaku atau dampak psikologis dari program tersebut.
Ika Juliana Putri (2022)	Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Paser	Hasil penelitian ini mengenai Implementasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Paser menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih belum maksimal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari keempat indikator tersebut, hanya struktur birokrasi yang dinilai sudah berjalan dengan baik karena adanya SOP	Penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih konseptual dan sistematis, berdasarkan teori kebijakan publik dan implementasi Edward III, dengan penekanan pada analisis faktor-faktor struktural dan operasional yang menghambat efektivitas program. Sedangkan menekankan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan ATENSI bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Seberida, dengan fokus pada permasalahan teknis dalam pelaksanaan bantuan, seperti data yang tidak akurat, keterlambatan, dan ketidaktepatan sasaran.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		yang jelas dari Kementerian Sosial. Sementara itu, tiga indikator lainnya yaitu komunikasi, sumber daya, dan disposisi belum berjalan secara efektif. Komunikasi masih menghadapi hambatan terutama dalam hal transmisi dan konsistensi informasi ke kelompok sasaran. Sumber daya, baik manusia maupun anggaran, sangat terbatas; hanya ada satu pendamping untuk seluruh Kabupaten Paser, dan dana bantuan serta insentif dinilai tidak memadai. Disposisi implementator juga kurang maksimal karena keterbatasan jumlah tenaga kerja dan rendahnya insentif yang diterima. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program asistensi sosial sangat dipengaruhi oleh ketercukupan sumber daya dan efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan.	
Fadli Akmali Zaidan, Risna Renawaty (2022)	Analisis Kebijakan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Di Sentra Wyata Guna Kota	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di	Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan yang konseptual dan sistematis, meninjau program



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bandung Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022	Sentra Wyata Guna Kota Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis dari Gilbert & Terrel, yang mencakup empat dimensi: Basis of Social Allocation, The Nature of Social Provision, The Structure of Delivery System, dan Mode of Finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ATENSI di Sentra Wyata Guna dijalankan secara selektif dengan penetapan penerima manfaat berdasarkan kriteria tertentu (equity).	ATENSI dalam kerangka kebijakan nasional dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip seperti equity, adequacy, dan cost-effectiveness. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan, tetapi juga mengevaluasi struktur, manfaat, penyampaian layanan, dan mekanisme pendanaan secara mendalam. Sedangkan penelitian saat ini menyoroti implementasi teknis program ATENSI di tingkat kecamatan (Seberida, Indragiri Hulu), dengan fokus pada hambatan operasional dan administrasi, seperti ketidaktepatan sasaran, data penerima yang tidak akurat, serta kurangnya distribusi bantuan. Penelitian Anisa lebih menekankan efektivitas implementasi di lapangan dan cenderung deskriptif terhadap pelaksanaan kebijakan.
---	---	--

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah sebuah pernyataan ringkas dan akurat yang bertujuan untuk menjelaskan makna dari suatu konsep.

1. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Pemerintah Republik Indonesia, 2016).
2. Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. (Sari, D., & Wulandari, 2018)
3. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah program pelayanan sosial yang bertujuan untuk membantu dan mendukung individu atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial atau kecanduan. (Zaidan, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional merujuk pada penjelasan yang spesifik dan terukur mengenai bagaimana suatu variable atau konsep dalam penelitian akan diamati, diukur, atau di manipulasi.

Tabel 2.2 Konsep Operasional Implementasi Kebijakan

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III	Komunikasi	- Sosialisasi program ATENSI - Kejelasan Informasi Kebijakan
	Sumber Daya	- Kualitas pelaksana - Sarana & prasarana (alat bantu, transportasi, tempat) - Ketersediaan Anggaran
	Disposisi / Sikap Pelaksana	- Komitmen pelaksana - Kepedulian terhadap penyandang disabilitas
	Struktur Birokrasi	- Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan - Pembagian tugas dan prosedur layanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

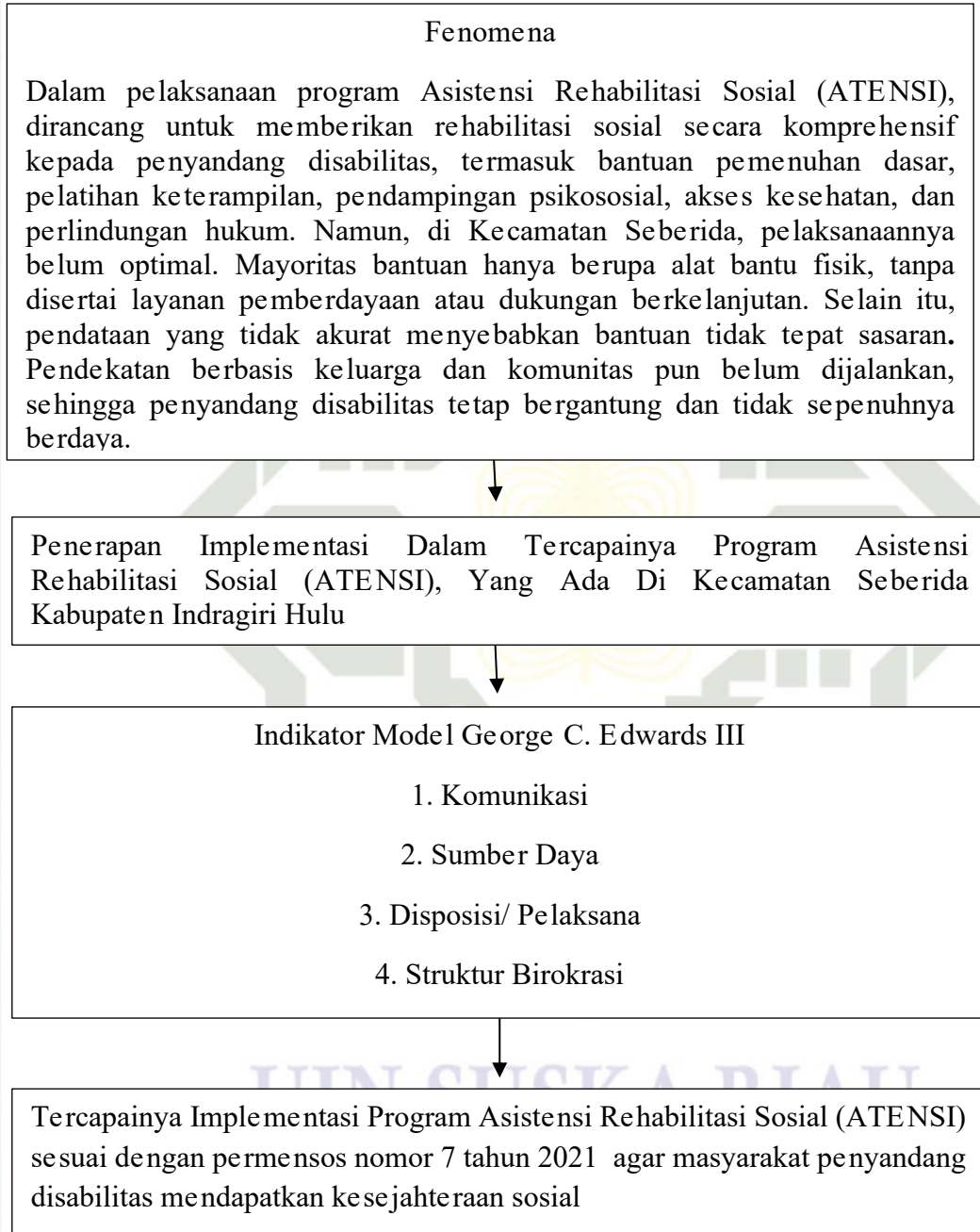
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kerangka Berpikir

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif, dengan maksud ingin mendapatkan gambaran yang mendalam tentang Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bagi Penyandang Disabilitas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu tradisi dalam ilmu sosial yang fokus pada pengamatan manusia di suatu wilayah dan bagaimana bahasa serta istilah berkaitan dengan individu-individu di dalamnya. Menurut Erikson (1986) dalam (Pahleviannur et al, 2022) penelitian kualitatif merupakan proses investigasi yang dilakukan secara intensif dan teliti tentang yang sedang terjadi di lapangan melalui refleksi analitis terhadap dokumen, bukti-bukti, dan disajikan secara deskriptif maupun langsung mengutip hasil wawancara.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan melihat banyak kejadian terkait masalah Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang tidak tepat sasaran, data yang tidak akurat dan permasalahan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN



3. Jenis Dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2020) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Seperti hasil wawancara dengan pejabat dinas sosial tentang kebijakan atensi, Wawancara dengan pendamping ATENSI, Wawancara dengan penyandang disabilitas penerima manfaat tentang pengalaman mereka, dan Catatan observasi saat kegiatan ATENSI berlangsung

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2020) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Seperti Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang Program ATENSI sebagai dasar hukum program, Laporan kegiatan ATENSI sebelumnya seperti Modul, pedoman teknis, atau laporan monitoring, adapun artikel atau penelitian terdahulu tentang implementasi program ATENSI bagi penyandang disabilitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2023), purposive sampling adalah metode pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria khusus, di mana individu yang dipilih dinilai memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait isu yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu dan wilayah masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, informan terdiri dari dua kelompok utama, yakni pihak internal Dinas Sosial sebagai pelaksana program dan masyarakat pengguna layanan ATENSI sebagai penerima manfaat. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pelaksanaan program Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas dari kedua sisi baik dari pelaksana kebijakan maupun pihak yang merasakan langsung dampaknya di lapangan.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1
2.	Pendamping ATENSI	2
3.	Perangkat Desa	2
4.	Masyarakat Penyandang Disabilitas	3

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025

Pengumpulan data dari para informan dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, yang memungkinkan peneliti memperoleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

informasi secara akurat dan menyeluruh. Metode ini digunakan untuk menggali pelaksanaan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas, termasuk berbagai hambatan, dukungan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Dinas Sosial Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Nasution dalam (sugiyono, 2023) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh). Seperti peneliti mengamati langsung bagaimana petugas melayani penyandang disabilitas, bagaimana proses pendampingan dilakukan, serta fasilitas apa saja yang tersedia. Dari observasi ini bisa dicatat fakta, misalnya ada petugas yang kewalahan karena menangani banyak penerima manfaat sekaligus.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam (sugiyono, 2023) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Seperti peneliti melakukan wawancara dengan petugas Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tentang kendala pelaksanaan program, penyandang disabilitas penerima manfaat mengenai pengalaman mereka, Pihak dinas sosial tentang anggaran dan kebijakan.

c. Dokumentasi

Menurut (sugiyono, 2023) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi. Seperti peneliti meminta data jumlah penerima manfaat program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) tahun 2022-2025 dari Dinas sosial, menyalin isi laporan kegiatan atau memotret fasilitas yang tersedia.

3.6 Teknik Analisa Data

Menurut (sugiyono, 2023) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif, artinya data yang didapat dari dokumen berupa jawaban atau keterangan, bukan berupa angka angka. Menurut Miles dan Huberman dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Sugiyono, 2023) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, terkait pelayanan yang diberikan, keterlibatan petugas, Wawancara dilakukann kepada pihak-pihak terkait, seperti petugas Dinas Sosial, pendamping ATENSI, dan penerima manfaat program, untuk menggali pengalaman, kendala, dan harapan mereka terhadap program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Sedangkan dokumentasi di peroleh dari laporan dinas, data jumlah penerima manfaat, serta dokumentasi resmi lainnya sebagai bahan pendukung analisis. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Reduksi Data (Data Reduction)

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Seperti dari hasil wawancara muncul berbagai informasi, namun peneliti hanya memilih yang terkait dengan permasalahan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), seperti kekurangan tenaga profesional, keterbatasan anggaran, dan kurang nya bantuan pada sosialisasi dan pemberdayaan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif seperti pernyataan langsung dari petugas yang masih sangat terbatas anggaran dan tenaga pendamping dibandingkan jumlah penyandang disabilitas yang harus dilampingi.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang



sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas seperti hasil wawancara dengan petugas ATENSI diketahui bahwa keterbatasan anggaran, membuat beberapa layanan tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Hal ini kemudian di verifikasi dengan data dokumentasi dari laporan dinas sosial yang menunjukkan adanya pengurangan alokasi anggaran program. Selain itu, hasil observasi lapangan memperkuat temuan bahwa pelayanan pendampingan tidak merata karena jumlah tenaga profesional yang terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu atau yang sering disebut Inhu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini kota Rengat, tetapi aktifitas administrasi berlangsung di pematang reba dengan jarak 18 km dari kota Rengat. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,26 Km (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut. Secara administrasi Kabupaten Indragiri Hulu terbagi menjadi 14 kecamatan, 178 desa dan 18 kelurahan.

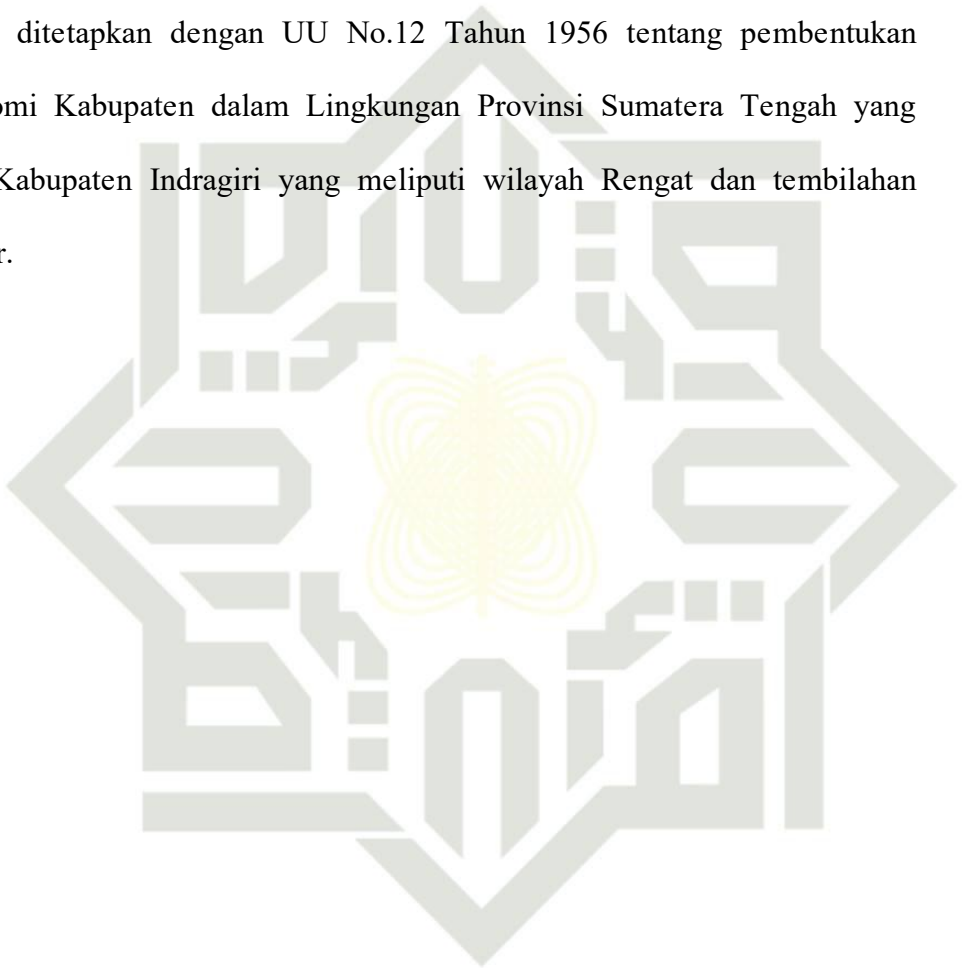
Kabupaten indragiri hulu merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi adat suku melayu, sumber daya alam yang besar, kehidupan sosial yang kuat serta keindahan alam yang permai. Untuk itu diperlukan pegawai yang berkompetensi sesuai dengan kemampuannya, agar sistem kemasyarakatan bersosial tersebut dapat berkembang secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas dan demi kemajuan kabupaten indragiri hulu di masa yang akan datang. Kerajaan indragiri berdiri pada tahun 1928 masehi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No.6 Tahun 1965, Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No.12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan tembilahan disebelah Hilir.



UIN SUSKA RIAU



Tabel 4.1 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota
1.	Kelayang	Simpang Kelayang
2.	Peranap	Peranap
3.	Rakit Kulim	Petonggan
4.	Pasir Penyu	Air Molek
5.	Sungai Lala	Kelawat
6.	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal
7.	Lirik	Lirik
8.	Batang Peranap	Pematang
9.	Rengat Barat	Pematang Reba
10.	Rengat	Rengat
11.	Kuala Cenaku	Kuala Cenaku
12.	Batang Gangsal	Seberida
13.	Batang Cenaku	Aur Cina
14.	Seberida	Pangkalan Kasai

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 2025

4.1.2 Kondisi Geografis dan Topografi Kabupaten Indragiri Hulu

Secara Geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU-120' LS dan 102-10' BT - 102-48" BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km² (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

27.20 C - 31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun.

Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus.

Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu:

Barat : Kabupaten Kuantan Singingi Timor : Kabupaten Indragiri Hilir

Utara : Kabupaten Pelalawan

Selatan : Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi

Ibu Kota Kabupaten ini adalah Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi ke dalam 14 daerah kecamatan, 154 desa dan 11 kelurahan. Hingga tahun 2008 populasi penduduk tercatat sebanyak 295.291 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 38.47 jiwa/km². Penduduknya terdiri atas suku Melayu sebagai kelompok mayoritas, Jawa, Minang, Batak dan keturunan Cina. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan sebagian kecil Protestan, Katolik, Budha dan penganut Animisme. Sektor yang paling menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan 67,77%, perdagangan 2.43%, industry 12,54% dan sektor lainnya adalah 17,29%.

Sekilas pandang tentang fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu saat ini meliputi jaringan jalan dengan panjang 1.590,62 km. Pelabuhan Sungai di Kecamatan Kuala Cenaku, 21 km dari Rengat, dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampung kapal dengan 1,500 dwt, lapangan terbang darurat di Japura yang hanya dapat menampung pesawat terbang ukuran kecil seperti F-27, DHN-7 dan C-160.

Menurut rencana di masa depan. Lapangan terbang ini diharapkan dapat diperluas agar mampu menampung pesawat terbang ukuran besar. Fasilitas dan infrastruktur lain yang telah ada saat ini antara lain listrik dengan kapasitas 33.726 KWH disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (tenaga diesel), air bersih, jasa pos, jaringan telepon, perbankan (Bank Nasional dan Lokal), fasilitas kesehatan dan beberapa fasilitas akomodasi (hotel berbintang dan non bintang) yang tersebar di beberapa kota seperti Rengat, Rengat Barat, Air Molek, Seberida dan Peranap.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar 1.2 : Peta Kabupaten Indragiri Hulu





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.1.3 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu

Dari catatan sejarah dapat diungkap bahwa Instansi Sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementrian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan. Tahun 1947, dengan keputusan Presiden RI no. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Berdasarkan Perpres 47 tahun 2009 Departemen Sosial berubah nama menjadi Kementerian Sosial.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Departemen Sosial sempat dibubarkan, namun urusan sosial di tingkat daerah tetap ada dan di Kabupaten Indragiri Hulu bernama Kantor Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2009 terjadi perubahan nomenklatur instansi pemerintah daerah dari Kantor Kesejahteraan Sosial berubah menjadi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan tujuan pemeringkatan instansi pemerintah pada tahun 2011 Dinas Sosial melebur dengan instansi lain menjadi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga kemudian pada tahun 2017 terjadi lagi perubahan nomenklatur pemerintah daerah menjadi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu hingga saat ini.

Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hulu melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu beralamat di Jalan Batu Canai No. 19 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat. Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh Kepala dinas, dibantu oleh Sekretaris, Tiga Kepala Bidang, Dua Kepala Sub Bagian dan Delapan Fungsional.

4.1.4 VISI dan MISI Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu

Visi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Visi pembangunan kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu dalam periode 2022- 2024 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pelayanan Berkualitas Bidang Sosial Lebih Baik.” Visi ini dimaksud agar Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peran serta PSKS. 4.2.2. Misi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 - 2024 serta visi Dinas Sosial dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Sebagai Berikut : Misi Pertama: “ Meningkatkan Kualitas dan Perluasan Jangkauan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Partisipasi Masyarakat Melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ” Misi ini mengandung makna : memberdayakan PMKS untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan dengan cara menciptakan peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin, pemberian bantuan dan santunan bagi Fakir Miskin, Anak Jalanan, Lanjut Usia, Yatim Piatu dan PMKS lainnya, memberikan bimbingan sosial dan keterampilan untuk PACA, WRSE, WTS, Eks Korban Bencana, Gepeng dan Anak Nakal bagi kemandirian hidup serta meningkatkan profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Seperti Karang Taruna, Organisasi Sosial, Wanita Penggerak Kesejahteraan Sosial (WPKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Yayasan Panti Sosial, Dunia Usaha melalui program CSR, Penyelenggaraan Undian, Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan, Perintis Kemerdekaan dan Pahlawan Kemerdekaan. Misi Kedua : “Menumbuhkan dan Meningkatkan Nilai-nilai Kejuangan, Kepahlawanan, Kepedulian dan Kesetiaan Masyarakat” Misi ini mengandung makna menumbuhkan nilai-nilai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepedualian dan kecintaan terhadap Bangsa dan Negara, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial juga nilai-nilai luhur kepahlawanan dan kesetiakawanan.

4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu

Struktur Organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu Organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu adalah.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Seberida belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, ditemukan bahwa aspek komunikasi masih lemah, ditandai dengan tidak adanya sosialisasi formal baik kepada pelaksana maupun masyarakat penyandang disabilitas. Selain itu, Dinas Sosial dan pendamping tidak menerima petunjuk teknis resmi, mereka hanya mempunyai pedoman dari Permensos no 7 Tahun 2021, sehingga implementasi berjalan berdasarkan arahan informal dan pemahaman masing-masing pelaksana. Pada aspek sumber daya, pelaksana program menghadapi keterbatasan jumlah SDM, sarana-prasarana, serta anggaran yang belum memadai dari pusat atau pun daerah. Kondisi ini menyebabkan ATENSI hanya berfokus pada pemberian bantuan fisik dan belum mampu melaksanakan layanan rehabilitasi secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan Permensos Nomor 7 Tahun 2021. Dari aspek disposisi, sikap pelaksana menunjukkan kepedulian dan komitmen yang baik terhadap penyandang disabilitas. Namun, keterbatasan pemahaman teknis akibat tidak adanya pedoman membuat pelaksana belum mampu memberikan layanan yang lebih komprehensif. Sementara itu, aspek struktur birokrasi juga belum berjalan efektif karena tidak adanya SOP teknis daerah, hanya pemberitahuan secara langsung atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur edaran, fragmentasi tugas yang belum rinci, serta lemahnya mekanisme monitoring dan pelaporan. Secara keseluruhan, implementasi Program ATENSI di Kecamatan Seberida belum memenuhi indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edwards III, sehingga tujuan program untuk memberikan rehabilitasi sosial secara utuh bagi penyandang disabilitas belum tercapai.

Faktor penghambatnya antara lain Dari aspek komunikasi, pelaksana program tidak menerima juknis resmi dan hanya mengikuti pedoman dari permensos no 7 tahun 2021, sehingga seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan arahan informal melalui WhatsApp atau instruksi lisan dan pedoman Permensos no 7 tahun 2021. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menyebabkan penerima manfaat tidak memahami tujuan dan mekanisme program, sehingga ATENSI hanya dipersepsikan sebagai penyaluran bantuan fisik. Pada aspek sumber daya, hambatan muncul dari keterbatasan jumlah pendamping, minimnya sarana-prasarana layanan, serta anggaran yang tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan kegiatan monitoring, asesmen, dan layanan rehabilitasi sosial tidak berjalan optimal. Fasilitas pendukung seperti ruang layanan dan tempat pelatihan tidak tersedia, sehingga program tidak dapat menyediakan layanan pemberdayaan sebagaimana standar Permensos No. 7 Tahun 2021. Dari aspek disposisi, meskipun pendamping memiliki komitmen dan kepedulian, ketiadaan pedoman teknis membuat pelaksana hanya mengandalkan pengalaman pribadi, sehingga pelaksanaan tidak seragam dan rentan salah tafsir kebijakan. Sementara dari aspek struktur birokrasi, tidak adanya SOP daerah, hanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

melibatkan permensos no 7 tahun 2021, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan tidak jelasnya alur layanan mengakibatkan program berjalan tanpa arah yang terstruktur. Monitoring dan pelaporan tidak dilakukan secara rutin, sehingga evaluasi program tidak dapat dilakukan secara berkala. Implementasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berasal dari lemahnya sistem pendukung kebijakan, mulai dari komunikasi yang tidak efektif, sumber daya yang terbatas, hingga struktur birokrasi yang belum terbentuk dengan baik. Hambatan-hambatan ini menyebabkan tujuan ATENSI untuk memberikan rehabilitasi sosial komprehensif bagi penyandang disabilitas belum dapat tercapai secara optimal.

6.2 Saran

Pada aspek komunikasi, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu perlu mendorong adanya penyampaian informasi yang lebih jelas dan terstruktur dari Kementerian Sosial, termasuk penyediaan pedoman teknis, SOP, dan juknis yang dapat menjadi acuan resmi pelaksana. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas harus dilaksanakan secara berkala agar kelompok sasaran memahami tujuan, mekanisme, serta manfaat program. Terkait sumber daya, pemerintah daerah perlu menambah jumlah pendamping, menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang layanan dan sarana pelatihan vokasional, serta mengalokasikan anggaran yang lebih memadai agar layanan rehabilitasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan fisik. Pelatihan peningkatan kapasitas juga perlu diberikan kepada pendamping agar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka memiliki pemahaman teknis yang lebih baik. pada aspek disposisi, meskipun pelaksana telah menunjukkan komitmen yang baik, perlu dilakukan pembinaan, workshop, dan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi dan pemahaman mereka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk aspek struktur birokrasi, Dinas Sosial perlu menyusun SOP teknis daerah yang jelas dan rinci bukan hanya pedoman dari Permensos Nomor 7 Tahun 2021 serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa. Selain itu, mekanisme pelaporan dan monitoring harus dilakukan secara rutin agar pelaksanaan program dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Dengan perbaikan pada keempat aspek tersebut, diharapkan implementasi Program ATENSI dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan penyandang disabilitas di Kecamatan Seberida.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

QS An-Nisa ayat 58

QS Asy-Syura ayat 38

Peraturan Undang-Undang :

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Asistensi Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Buku :

Marwiyah, S. (2022). Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik. CV Mitra Ilmu

Pahleviannur, M. R., (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukoharjo: Pradina Pustaka.

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Desrinelti, D., Maghfirah Afifah, N. G. (2021). *Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan*.

George III Edward, (1980). *implementing public policy*.

Indiahono, D. (2005). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Gava Media æ Yogyakarta*.

Mazmanian, Daniel A & Paul A Sabatier, (1983). *impementation and public policy*.

N Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik - Terjemahan*. 710.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rantung, M. I. R. 2024. *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Jurnal :

Atifah, M. H. (2023). Interaksi Komunikasi Antara Mahasiswa Non Disabilitas Dengan Mahasiswa Disabilitas Di Universitas Teknologi Sumbawa. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 832–843.

Deddy, M. (2018). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik konsep dan aplikasi proses kebijakan dan pelayanan publik. *Jakarta: Alfabeta*, 284.

Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.

Effendi, S. (2021). Publikasi Ilmiah dan Kebijakan Publik. *Kompas*, 1–4.

Fidiyani, R., Nuzulia, S., Mukminto, E., Riyatno, R., Paramita, H., Hanum, H. L., Putri, D. A., Wardana, S. D. S., & Warayuda, T. M. E. (2024). Pemenuhan Hak-hak Mendasar bagi Disabilitas Mental sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia menurut Hukum yang Berlaku. In *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* (Vol. 3).

Goggin, M. L., Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1984). Implementation and Public Policy. In *CrossRef Listing of Deleted DOIs* (Vol. 14, Issue 4).

Hestiantini, A. P., & Pribadi, U. (2020). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Bidang Kesejahteraan Sosial (Jaminan Sosial) Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1).

Kurhayadi. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(3), 93–102.

Kasnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 2(2), 126–150.

Maharani, S., Purwanti, D., & FY Basori, Y. F. (2023). Implementasi Program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Sukabumi. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 392–402.

Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Cv. Aa. Rizky, September, 1–126.

Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131.

Pernomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161.

Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166.

Sari, D., & Wulandari, R. (n.d.). *Konsep dan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis pada Penyandang Disabilitas*.

Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251–272.

Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik; Pengdelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah. *FISIPOLO Universitas Mostafa Beragama Pers*, 1993, 15.

Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 27–37.

Van Meter, D. S. & Van Horn, C. E. (2020). Proses Implementasi Kebijakan: Sebuah Kerangka Konseptual. *Jurnal Administrasi Dan Masyarakat*, 6(4), 445–488.

Wahab Abdul, S. (2002). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. *Jakarta: Bumi Aksara*.

Winarno Budi, & Admojo Trio. (2014). *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Proses dan Studi Kasus - Kasus Komparatif*. 0–142.

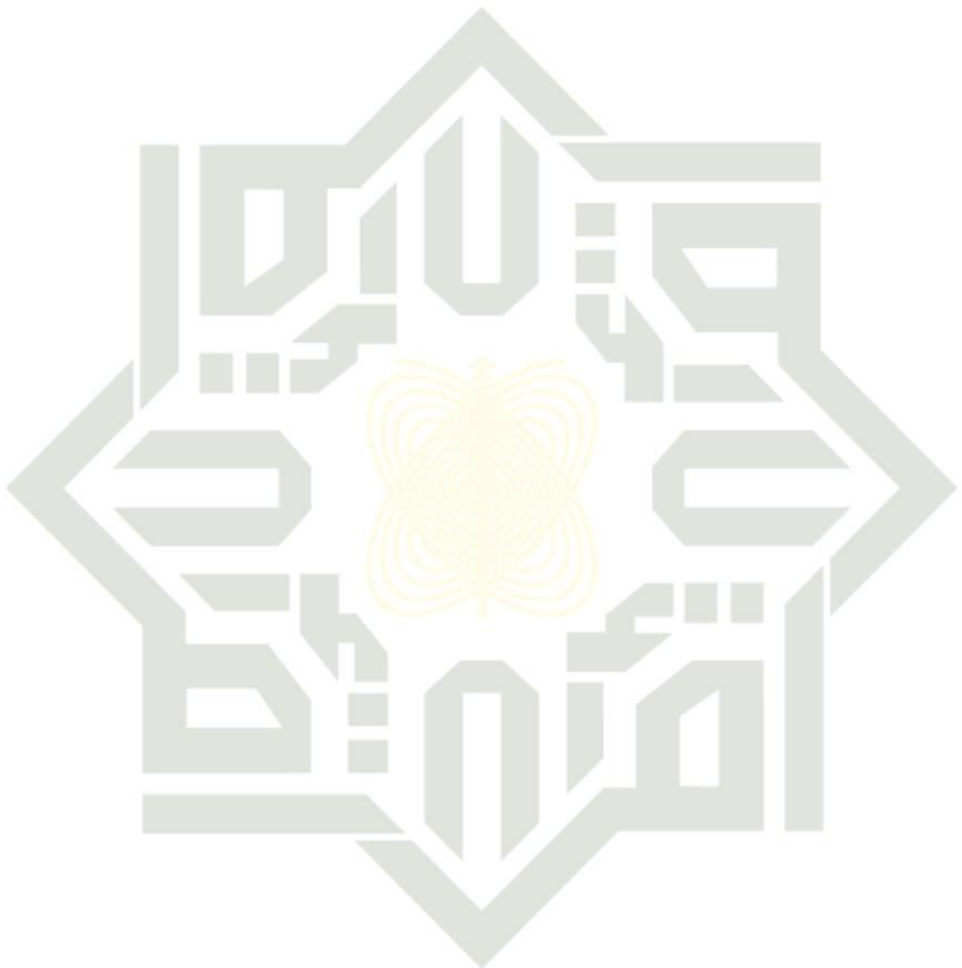
Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.

Zacky Aqshal Dhamara Putra, & Hasan Ismail. (2024). Implementasi Aplikasi



Analisis Beban Kerja Terkait Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 189–199.

Zaidan, F. A. (2024). Analisis Kebijakan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Di Sentra Wyata Guna Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 6(2).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Faisal Ilahi, S.Sos



Wawancara dengan Pendamping 1 Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Kak Ajeng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial 2 Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Bang Andri



Wawancara dengan Masyarakat Penyandang Disabilitas Dan Aparat Desa, Bapak Syamsuddin dan Sekretaris Desa Bapak Ade Rosidin, Desa Buluh Rampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Masyarakat Penyandang Disabilitas dan Aparat Desa, Bapak Ari dan Bapak Pramnoto Desa Titian Resak



Wawancara Dengan Masyarakat Penyandang Disabilitas Bapak Min Desa Titian Resak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.